



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SABDO KURNIANTO**

Jabatan : **Plt. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta**

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D**

Jabatan : **Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta**

selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2021

PIHAK KEDUA,

Jakarta, **PIHAK PERTAMA,**

2021

Gubernur

Plt. Kepala Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta,

Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D

SABDO KURNIANTO
NIP 196501221990031004

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Nama : Sabdo Kurnianto
 NIP : 196501221990031004
 Jabatan : Plt. Kepala Pelaksana Badan
 Unit Kerja : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Keterangan
						I	II	III	IV	

1	Terwujudnya Jakarta kota tangguh bencana.	1	Indeks Risiko Bencana	e-SAKIP	Mengukur Indeks Risiko Bencana berdasarkan probabilitas spacial frekuensi dari bahaya alam X parameter sosial budaya,ekonomi,fisik dan lingkungan dibagi pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas : 1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan 2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu 3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik 4. Peningkatan tematik kawasan rawan bencana 5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana 6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, dan 7. Pengembangan sistem pemulihan bencana.	N/A	N/A	66,54	N/A	66,54	Nilai
---	---	---	-----------------------	---------	--	-----	-----	-------	-----	-------	-------

2	Meningkatnya Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	1	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	e-SAKIP	Nilai rata-rata persentase pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, serta pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Rumusan: Persentase Pelayanan Informasi rawan bencana = Jumlah Warga di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana/ jumlah warga yang berada di kawasan rawan bencana x 100% Persentase Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana = Jumlah warga yang memperoleh pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana / Jumlah warga yang berada di kawasan bencana x 100% Persentase Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana = Jumlah warga yang memperoleh penyelamatan dan evakuasi / perkiraan jumlah warga yang terkena bencana x 100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	Persen
---	--	---	--	---------	--	-----	-----	------	------	------	------	--------

Sasaran Strategis

3	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran	1	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	1	100%	91	91%	Persen	
4	Terwujudnya pembangunan kota yang setara gender serta ramah perempuan dan anak	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak nomor (13)	1	100%	100%	100%	Persentase	
5	Terwujudnya tata kelola Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat A nomor (39)	1	100%	100%	100%	Persentase	
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan nomor (61)	e-Monev KSD	Realisasi rencana aksi KSD mengenai Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor(61)	N/A	100%	Persentase	
				e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian target penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA Nomor(39)	100%	100%	Persentase	
				e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian target penyelesaian rencana aksi Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Nomor(13)	100%	100%	Persentase	
				e-SAKIP	<p>Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 komponen yaitu:</p> <p>a. Penyerapan Anggaran: Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Peringkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran $\geq 80\%$. Apabila serapan anggaran di bawah 80% maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (Persentase Serapan Anggaran x 40%); Anggaran yang dipertungkan meliputi APBD dan BLU, dan tidak termasuk dana transfer dari pemerintah pusat.</p> <p>b. Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sasarnya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak dikur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya.</p> <p>c. Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran hasil inputan PD/UKPD</p> <p>Formulasi pengukuran adalah sebagai berikut:</p> <p>1. Serapan Anggaran $\geq 80\%$ dan output 100% Realisasi = $(40\%) + ((\%efisiensi \times 10\%)/20\%) + (50\%)$</p> <p>2. Serapan Anggaran $< 80\%$ dan output $< 100\%$ Realisasi = $(Penyerapan Anggaran \times 40\%) + (pencapaian output \times 50\%)$</p> <p>3. Serapan Anggaran $\geq 80\%$, namun output $< 100\%$ Realisasi = $(40\%) + (pencapaian output \times 50\%)$</p>	N/A	N/A	N/A	N/A

6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	1	Persentase penyelesaian rencana aksi implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Nomor(63)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian rencana aksi implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Nomor(63)	100%	N/A	100%	N/A	100%	WTP	
7	Terwujudnya Jakarta kota tangguh bencana	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengelolaan Bencana Risiko Daerah (67)	e-Monev KSD	Realisasi rencana aksi KSD mengenai Pengelolaan Pengurangan Risiko Bencana Daerah (67)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase	
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim nomor (72)	e-Monev KSD	Realisasi rencana aksi KSD mengenai Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim Nomor(72)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase	
8	Terpenuhinya kebutuhan dasar pengungsi	1	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar	e-Kinerja	Persentase pengungsi terlayani kebutuhan dasarnya 1. Air Bersih, 2. Pangan, 3. Sanitasi, 4. Hunian Sementara, 5. Sandang, 6. Pelayanan Kesehatan, yang mengacu pada Peraturan Kepala BNPB tentang Pemenuhan Kebutuhan Dasar no 7 tahun 2008. 1. Terpenuhinya kebutuhan Air Bersih : PDAM 2. Terpenuhinya kebutuhan Pangan dan Air Minum : BPBD dan Dinas Sosial 3. Terpenuhinya kebutuhan Sanitasi : Dinas Lingkungan Hidup 4. Terpenuhinya kebutuhan Hunian Sementara : BPBD dan Dinas Sosial 5. Terpenuhinya kebutuhan Sandang : BPBD dan Dinas Sosial 6. Terpenuhinya kebutuhan Pelayanan Kesehatan : Dinas Kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
9	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	Jumlah rupiah realisasi Belanja Makanan dan Minuman yang memanfaatkan e-order dibagi Jumlah anggaran Belanja Makanan dan Minuman x 100%. Rumus perhitungan menggunakan tipe Absolut	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase	
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Opini laporan keuangan daerah	e-Kinerja	Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah Pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keadaan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%))	N/A	3	N/A	N/A	3	WTP	
Sasaran Khusus												

Sasaran Operasional

14	Terselenggarakannya Tindak Lanjut Arahannya	Arahannya	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahannya	e-Kinerja	Jumlah Realisasi TL Arahannya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
15	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
16	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya dibagi jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima Tahun 2005 dan seterusnya dikali 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Persentase

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

 Anies Rasyid Baswedan, Ph.D

Jakarta, 2021
 Pj Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

 Sabdo Kurnianto
 NIP 196501221990031004